

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada saat ini teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang dengan cukup pesat sehingga memungkinkan untuk setiap organisasi membutuhkan TIK sebagai alat untuk memenuhi tujuan sebuah perusahaan atau organisasi. Dengan berkembangnya TIK mendorong instansi Pemerintahan Indonesia untuk menerapkan *E-Government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Nadhifah dkk., 2023).

Menurut Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018, *E-Government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 Tahun 2018, 2018). Dengan diimplementasikan SPBE ini dapat memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, dengan SPBE dapat meningkatkan kerja sama antar instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama.

Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 mengenai SPBE menekankan pentingnya bagi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk bekerja sama secara sinergis yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Oleh karena itu, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota perlu melakukan standarisasi SPBE sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan. Proses standarisasi SPBE berpedoman pada Peraturan Presiden No .132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Dalam Peraturan Presiden No.132 tahun 2022 terdapat regulasi yang mengatur pengintegrasian dan harmonisasi pelaksanaan bisnis, pengelolaan data dan informasi, pengembangan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan yang diterapkan. Arsitektur SPBE Nasional ini menjadi pedoman bagi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Tujuan utamanya untuk mendukung pembangunan nasional, termasuk proyek-proyek prioritas strategis yang beragam (Peraturan Presiden No 132 Tahun 2022, 2022).

Pada penelitian ini, penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi telah berupaya untuk menerapkan SPBE dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Namun, penerapan SPBE di Pemerintah Kota Cimahi masih menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah terdapat beberapa layanan publik yang belum sepenuhnya terintegrasi dan mencakup seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Dinas.

Upaya penerapan SPBE di Pemerintah Kota Cimahi dapat dilihat dari hasil pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang terdapat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, nilai indeks Pemerintahan Kota Cimahi sebesar 4,02 dan berpredikat “Sangat Baik”. Pengukuran nilai indeks ini tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkan SPBE dibutuhkan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pemantauan dan evaluasi ini memiliki tujuan untuk mengukur atau mengetahui kemajuan dalam menerapkan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah.

Tabel I. 1 Predikat Penilaian SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 - 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3.	2,6 - < 3,5	Baik
4.	1,8 - < 2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang

Berdasarkan tantangan yang dihadapi, Pemerintah Kota Cimahi masih perlu meningkatkan integrasi layanan publiknya. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan layanan publik dan administrasi pemerintah yang baik, menciptakan integrasi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat untuk Pemerintahan Kota Cimahi.

Layanan publik yang difokuskan pada penelitian ini yaitu layanan yang dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Berdasarkan peraturan Walikota Cimahi No 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

Cimahi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi merupakan unsur pelaksana pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah kota. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi memiliki tanggung jawab penting dalam menjalankan kebijakan dan program terkait lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah tersebut. Dalam menjalankan programnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, salah satu layanan publik yang dihasilkan masih mengalami beberapa kendala, khususnya layanan yang berkaitan dengan Fungsi Tata Lingkungan yaitu layanan pelaporan persetujuan lingkungan. Fungsi Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi didukung oleh beberapa layanan publik dalam bentuk digital. Namun, ditemukan bahwa fungsi sistem informasi dari layanan publik tersebut masih belum berjalan secara optimal, dikarenakan beberapa fitur belum tersedia dan tidak sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi Fungsi Tata Lingkungan. Penelitian ini secara spesifik berfokus pada penyusunan rancangan SPBE pada Fungsi Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi yang bertujuan membantu dalam memberikan perbaikan dan peningkatan sesuai dengan kebutuhan, serta menghasilkan rancangan arsitektur SPBE yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Penyusunan rancangan SPBE ini menggunakan *The Open Group Architecture Framework* (TOGAF). TOGAF merupakan kerangka kerja yang menyediakan panduan rinci tentang cara membangun, mengelola, dan menerapkan arsitektur perusahaan. Ini mencakup pendekatan yang disebut dengan *Architecture Development Method* (ADM). TOGAF ADM terdiri dari, *Preliminary Phase, Achitecture Vision, Business Architecture, Information System Architecture, Technology Architecture, Opportunities & Solutions, Migration Planning, Implementation Governance, Architecture Change Management*. Namun, untuk penelitian ini hanya menerapkan TOGAF ADM dari Fase *Preliminary* hingga *Technology Architecture*. Dengan perancangan yang digunakan ini harus juga mengacu pada Aturan Nasional SPBE agar menciptakan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana rancangan arsitektur eksisting SPBE pada Fungsi Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi?
2. Bagaimana penyusunan arsitektur target SPBE Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada Fungsi Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dengan menggunakan TOGAF ADM dan mengacu pada Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini:

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting rancangan arsitektur SPBE yang ada dalam Fungsi Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.
2. Menyusun arsitektur target SPBE Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada Fungsi Tata Lingkungan dengan menggunakan TOGAF ADM dan mengacu pada Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang arsitektur SPBE.

I.4 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, berikut batasan masalah untuk penelitian ini:

1. Penelitian ini berfokus pada perancangan atau pengembangan SPBE dengan menerapkan pendekatan TOGAF ADM hingga mencapai fase D yang disesuaikan dengan Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.
2. Penelitian ini hanya berfokus di perancangan arsitektur SPBE pada lingkup Fungsi Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

I.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Universitas, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan usulan yang efektif untuk meningkatkan SPBE Pemerintahan Kota Cimahi sehingga dapat meningkatkan reputasi universitas sebagai lembaga yang memberikan inovasi dan solusi yang praktis.
2. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan lebih luas tentang bagaimana menerapkan SPBE dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam situasi dunia nyata.
3. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan SPBE khususnya untuk Fungsi Tata Lingkungan dan dapat meningkatkan layanan yang memerlukan pengembangan.